

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
DESA, TUJUAN: DESA TANPA KEMISKINAN  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
KABUPATEN CIAMIS**

**Firda Tari Triani**

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

\*Korespondensi : [firdatarii07@gmail.com](mailto:firdatarii07@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Pejabat Fungsional, Kabid Pemerintahan Desa, Pendamping Desa, dan Kepala Desa Cikoneng. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal dan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih adanya indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, diantaranya: belum mumpuninya pelaksana program SDGs Desa, masih rendahnya jangkauan perubahan yang diinginkan dalam menekan angka kemiskinan, masih rendahnya sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs Desa, belum efektifnya sasaran dan target, dan intervensi kebijakan yang belum optimal.

**Kata Kunci** : Efektivitas Kebijakan, SDGs Desa, Kesejahteraan.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the ineffectiveness of the implementation of the Village Sustainable Development Goals policy in improving the welfare of the community in Ciamis Regency. In this study, the author uses a qualitative descriptive research method. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Village Sustainable Development Goals policy in improving community welfare in Ciamis Regency. The data collection techniques used by the author in this study are literature studies and field studies, which consist of observations and interviews. The data processing/analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The informants in this study were 5 people, consisting of the Head of DPMD Ciamis Regency, Functional Officials, Head of Village Government, Village Assistants, and Cikoneng Village Head. Based on the results of the study, it is known that the effectiveness of the Village Sustainable Development Goals policy in improving community welfare in Ciamis Regency has not*

*been fully optimal and effective. This is because there are still indicators that are not appropriate in their implementation, including: the lack of qualified implementers of the Village SDGs program, the low reach of the desired changes in reducing poverty, the low resources involved in the implementation of the Village SDGs, the ineffectiveness of goals and targets, and policy interventions that are not optimal.*

**Keywords :** *Policy Effectiveness, Village SDGs, Welfare.*

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional bagi seluruh negara di dunia. Segala aspek kehidupan tercakup dalam bagian masalah kemiskinan, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam berbagai skema yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global. Perkembangan global menunjukkan adanya keinginan dari seluruh negara di dunia untuk mengembangkan skema MDGs menjadi lebih komprehensif, dengan memperkenalkan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan sejalan dengan komitmen tersebut, maka pelaksanaan dan realisasi SDGs akan dilakukan secara partisipatif.

Permendes Nomor 13 Tahun 2020 dasar utama pembangunan desa untuk kesejahteraan maupun pendidikan yang berkualitas dalam kehidupan. Setiap penggunaan pembangunan diwajibkan SDGs Desa sebagai dasar arah pembangunan guna mengentaskan kemiskinan dan kelaparan serta pada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda

dari sisi jumlah maupun persentasenya. Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2014 sebanyak 99.810 jiwa atau sebesar 8,59% dan tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 85.720 jiwa atau sebesar 7,22% (RPJMD Kabupaten Ciamis, 2019). Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan lagi dengan persentase 7,42 persen (Badan Pusat Statistik, 2023), hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk.

Dalam perjalanannya skor SDGs Desa yang diperoleh Kabupaten Ciamis sebesar 51,56% diambil dari rata-rata skor 18 Goals SDGs Desa dari 259 desa per hari Senin, 6 Mei 2024, (Data SDGs Desa, Senin 6 Mei 2024). Sedangkan untuk capaian indikator Desa Tanpa Kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis berada dalam persentase 46,92%, (Sumber: Data SDGs Desa, Senin 6 Mei 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Ciamis belum bisa dikatakan aman, dan tentunya diperlukan usaha yang keras dalam menghapus kemiskinan di Kabupaten Ciamis dengan melakukan efektivitas program SDGs Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Dalam momentum penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Desa, DPMD memberikan arahan bahwa RPJM Desa harus mengacu pada SDGs bersama seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Ciamis. Setiap desa di Kabupaten Ciamis dalam pembuatan RPJM Desa harus memuat dan berbasis pada pemutakhiran SDGs dan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai langkah dalam ketepatan sasaran dalam implementasi RPJM Desa.

Berdasarkan hasil penelitian awal menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis dalam implementasi kebijakan program SDGs belum efektif dalam pelaksanaannya, hal itu dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis. Hal ini tentunya membuat penggunaan anggaran dana desa terjadi tumpang tindih penganggaran.
2. Kinerja aspek pelayanan mengenai SDGs Desa yang masih rendah dan terbatas, contohnya dapat dilihat dari masih kurangnya bentuk pelatihan dan pengarahan yang bersifat khusus diperuntukan bagi kelompok/orang miskin.
3. Belum efektifnya pengoptimalan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. SDGs Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya tepat pada sasaran inti untuk pengentasan kemiskinan.

Dari penjelasan indikator-indikator permasalahan diatas dapat dilihat bahwa pengimplementasian kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya terealisasi dengan efektif. Efektivitas Kebijakan merupakan hal yang sangat

penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program dalam memberikan manfaat dari tujuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara.

Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang, yang terdiri dari Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Pejabat Fungsional, Kabid Pemerintahan Desa, Pendamping Desa, dan Kepala Desa Cikoneng.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa, Indikator: Desa Tanpa Kemiskinan di Kabupaten Ciamis ditinjau berdasarkan lima dimensi tingkat keterlaksanaan efektivitas kebijakan menurut teori yang dikemukakan oleh (Nugroho, 2018:51), sebagai berikut:

### **1. Tepat Kebijakan**

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan

tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya. Tepat kebijakan yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Adanya ukuran ketercapaian implementasi kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis

Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tentunya harus mempertimbangkan segala bentuk dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan. Sehubungan dengan ukuran ketercapaian, maka dari sudut proses implementasi perlu dipahami terkait keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan yang berpengaruh terhadap kelancaran implementasi tersebut.

Dengan adanya ukuran ketercapaian akan membuat suatu kebijakan dapat dilihat sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya dan akan memberikan gambaran untuk evaluasi kedepannya. Oleh karena itu, pengukuran implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* Desa harus dilakukan dengan efektif supaya ketercapaian yang diinginkan bisa lebih terpetakan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya ukuran ketercapaian implementasi kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis berjalan cukup baik, hal tersebut dilihat dari pengendalian pelaksanaan dalam suatu manajemen implementasi yang output nya berupa kebermanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan di suatu desa bisa terwujud. Misalnya, dalam

mencapai desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, pemerintah desa di Kabupaten Ciamis telah melakukan upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Padat Karya Tunai Desa. Dalam hal ini implementasi kebijakan dapat terukur dari banyaknya masyarakat yang merasakan dampak dari program SDGs Desa yang dilaksanakan.

- b. Keberhasilan implementasi SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan

Proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang hendak dicapai dan tentunya berkaitan dengan cara yang sudah dirumuskan. Hal tersebut berkaitan dengan manfaat yang dihasilkan, manfaat tersebut akan terlihat dari kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat atau mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multidimensi. Oleh karena itu, pemerintah menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (*monetary approach*).

*Sustainable Development Goals* Desa diyakini sebagai salah satu upaya konsep pembangunan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Semakin banyak manfaat yang dihasilkan maka akan semakin banyak pula dukungan masyarakat (sebagai penerima manfaat) dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa keberhasilan implementasi kebijakan SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan di

Kabupaten Ciamis terlaksana cukup baik, hal tersebut terlihat dari adanya capaian keberhasilan dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Ciamis dalam upaya pengimplementasian kebijakan SDGs Desa untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Rencana Strategis (Renstra) DMPD Kabupaten Ciamis dan RPJMD Kabupaten Ciamis tercantum bahwa kelompok sasaran pembangunan adalah masyarakat. Selain itu, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu dimanfaatkan untuk menggali potensi-potensi dan mengurangi angka kemiskinan di desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, adanya implementasi kebijakan SDGs Desa merupakan perwujudan untuk memenuhi kepentingan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana menurut Nugroho (2017:18) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, dengan kata lain kebijakan yang dilakukan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pengimplementasiannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa keberhasilan implementasi SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari pengelolaan anggaran dana desa yang masih bercampur dengan program yang lain, sehingga tidak ada fokus tersendiri untuk mencapai sasaran inti yaitu pengentasan kemiskinan di masyarakat.

## **2. Tepat Pelaksana**

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara

pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Tepat pelaksana yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

### **a. Pelaksana Program SDGs Desa**

Keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat menunjukkan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada. Dalam hubungan tersebut maka dapat ditetapkan secara dini adanya perbedaan peran dalam berbagai satuan birokrasi yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan program (Rahmawati, 2020:29).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaksana program SDGs Desa belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat masih minimnya pengetahuan dan kemampuan DPMD maupun Pemerintah Desa dalam melaksanakan program SDGs Desa sehingga belum mampu mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, misalnya belum adanya sikap kreatif dan adaptif dalam menyusun strategi pelaksanaan SDGs Desa.

Nugroho (2017) menyatakan bahwa: “Pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor pemerintah sebagai agensi eksekutif. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat harus dikelola dengan baik, pemerintah sebagai

penyelenggara harus dapat memainkan peran strategisnya”.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksana program SDGs Desa di Kabupaten Ciamis belum maksimal. Hal tersebut karena pelaksana program diantaranya pihak DPMD dan Pemerintah Desa belum memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga pelaksanaan program belum dapat dijalankan dengan baik.

b. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa

Setiap keputusan yang diambil akan berakibat pada pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadi perbedaan keberhasilan implementasi yang diakibatkan oleh perbedaan kapasitas birokrasi dalam pengelola keberhasilan program (Rahmawati, 2020:29). Dengan demikian, dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan SDGs Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya memadai, hal tersebut dibuktikan oleh sumber daya manusia sebagai pelaksana yang masih belum mumpuni. Sedangkan dalam segi anggaran sangat terbatas dimana hal tersebut membutuhkan skala prioritas dalam pemanfaatannya sehingga dapat tetap menunjang pelaksanaan suatu program dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yaitu penentuan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program atau kegiatan pembangunan desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dalam penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III dalam (Mulyadi, 2014: 99) menjelaskan bahwa:

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa belum memadainya sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan SDGs Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut karena masih minimnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana atau implementor sehingga kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan program SDGs Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa.

### 3. Tepat Target

Sasaran target merupakan unsur penting demi tercapainya tujuan, target yang jelas dan tepat akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Ketepatan target ini berkenaan juga dengan bagaimana intervensi yang harus disesuaikan dengan rencana, sehingga menghindari adanya tumpang tindih dengan intervensi kebijakan yang lain. Selain itu, dilihat juga bagaimana kesiapan dari intervensi yang akan dilakukan yang senantiasa harus disesuaikan dengan keadaan berkonflik supaya sasaran target bisa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan. Tepat target berpengaruh pada keberhasilan suatu efektifitas kebijakan, yang terdiri dari indikator sebagai berikut:

#### a. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Program yang ditetapkan pastinya mengharapkan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat, tetapi untuk program yang dirancang pada perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan sulit diimplementasikan. Perbedaan yang menyangkut perubahan perilaku yang dikehendaki pada pihak yang menerima manfaat dari program tertentu akan mempengaruhi implementasi. Dalam hal ini, efektifitas suatu kebijakan berkenaan juga dengan bagaimana ketepatan suatu target yang hendak dicapai (Nugroho, 2018:66).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa jangkauan perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan SDGs Desa belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal tersebut terlihat dari hasil perolehan skor capaian SDGs Desa di Kabupaten Ciamis di

angka 51,56%, sedangkan untuk angka kemiskinannya mencapai 64,56%. Hal tersebut juga terjadi di salah satu desa yang ada di Kabupaten Ciamis yaitu Desa Cikoneng yang hanya mendapat capaian skor SDGs 59,60% dan untuk kategori desa tanpa kemiskinan berada dalam angka 27,11 (Diambil dari pemutakhiran data per tanggal 15 Mei 2024).

Grindle dalam (Abdal, 2015:132) menyatakan bahwa:

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa jangkauan perubahan yang diinginkan dari kebijakan SDGs Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis belum terlaksana dengan baik, hal tersebut karena rata-rata desa di Kabupaten Ciamis belum mencapai jangkauan atau target SDGs Desa yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian kembali.

#### b. Mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat kurang mampu

Suatu kebijakan yang dibuat tentunya menginginkan kepastian bahwa semua masyarakat dapat memenuhi potensi mereka dalam harkat dan martabat manusia melalui pengakhiran segala bentuk kemiskinan. Konsep kebijakan pembangunan harus menelaraskan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan

dan pemerintah. Serta, segala usaha untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan harus berjalan seiring dengan strategi-strategi pembangunan yang mendukung. Konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu pilihan, melainkan kewajiban, karena pembangunan berkelanjutan merupakan kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa pengembangan program SDGs Desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan senantiasa melakukan pematangan konsep dalam setiap implementasinya dan tentunya harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang mengarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Dan untuk Kabupaten Ciamis terkait hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dan merata, hal demikian terjadi karena perbedaan setiap kondisi wilayah, sehingga standar capaiannya pun akan berbeda garis mulai dan akhirnya. Maka dibutuhkan suatu kerjasama dari *stakeholder*:

#### **4. Tepat Lingkungan**

Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Lingkungan implementasi yang berpengaruh pada

keberhasilan implementasi kebijakan terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

##### **a. Kepentingan aktor yang terlibat**

Implementasi kebijakan biasanya mencakup banyak aktor. Keseluruhan aktor tersebut mungkin secara intensif atau tidak tergantung konten dari program dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Masing-masing aktor mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan atau program dengan membuat tuntutan (permintaan atas pengalokasian prosedur-prosedur. Seringkali tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya, termasuk pada hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa akan ditentukan melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing-masing aktor (Rahmawati, 2020:29-30). Dalam hal ini, kebijakan SDGs Desa perlu didukung dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat karena tanpa hal tersebut kebijakan SDGs Desa akan sulit diimplementasikan dan tidak akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis terkait kepentingan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis yaitu berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari adanya sinergitas antara masing-masing stakeholder dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini.

##### **b. DPMD menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan SDGs Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Dalam momentum penyusunan Rancangan



Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, DPMD memberikan arahan bahwa RPJM Desa harus mengacu pada SDGs bersama seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Ciamis. Setiap desa di Kabupaten Ciamis dalam pembuatan RPJM Desa harus memuat dan berbasis pada pemutakhiran SDGs dan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai langkah dalam ketepatan sasaran dalam implementasi RPJM Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa ketepatan lingkungan yang berkaitan dengan aktor yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan, bahwasannya DPMD Kabupaten Ciamis sebagai salah satu aktor dalam menjalankan kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis sudah baik dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut dilihat dari bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh DPMD untuk senantiasa memberikan pengarahan terkait kebijakan SDGs Desa dan menguatkan sinergitas dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk saling sulam tambal dalam proses mencapai target yang sudah ditentukan.

Sebagaimana menurut Grindle dalam (Abdal, 2015:133) bahwa lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka karakteristik dari suatu lembaga dan rezim kekuasaan akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa tepat lingkungan dalam kebijakan SDGs Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut karena adanya dukungan dari lembaga-lembaga terkait SDGs Desa dan peraturan pelaksanaan SDGs Desa,

sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan target yang ingin dicapai.

## 5. Tepat proses

Tepat proses digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Tepat proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

Secara umum, implementasi kebijakan public terdiri dari tiga proses yaitu (1) *policy acceptance*, Disini *public* memahami sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan, (2) *policy adoption*, disini *public* menerima sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan, (3) *strategic readiness*, disini *public* siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat *on street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan. Tepat proses tersebut terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:

### a. Reliabilitas dalam melaksanakan SDGs Desa

Reliabilitas mengacu pada keandalan atau ketepatan suatu instrumen pengukuran. Selain itu, reliabilitas dapat menghasilkan instrumen pengukuran yang konsisten, memastikan akurasi hasil penelitian, mengidentifikasi item-item yang tidak reliabel, dan meningkatkan kepercayaan terhadap penelitian.

Dengan reliabilitas yang dilakukan maka kita akan dapat menyingkronkan

suatu kebijakan dengan konsistensi dari implementasi di lapangan. Dalam hal ini, sangat diperlukan suatu uji kelayakan dan ketepatan untuk dapat melihat bagaimana efektivitas dan efisiensi dari kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan penelitian yang didapat dari wawancara dengan Pejabat Fungsional DPMD terkait reliabilitas pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis yaitu diperlukan suatu akurasi data, kualitas data yang dihasilkan dari proses pendataan SDGs Desa yang dilakukan oleh para pokja relawan pendataan SDGs. Efektivitas kinerja pencapaian SDGs Desa menggantungkan pada hitungan data yang berkualitas yang terukur, akurat dan pastinya sesuai dengan fakta dilapangan.

b. Adanya penyusunan agenda prioritas terhadap pelaksanaan SDGs Desa

Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah panduan tentang apa yang akan dilakukan untuk pencapaian SDGs baik jangka pendek tahunan maupun jangka panjang 5 (lima) tahun, atau disesuaikan dengan jangka waktu RPJMN dan/atau RPJMD. Dalam kerangka pencapaian SDGs Desa perlu diperhatikan terkait proses pengumpulan dan penyediaan semua data yang dibutuhkan serta perlu diperhatikan terkait proses penyusunan rencana yang diwujudkan dalam dokumen rencana aksi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terkait dengan tepat proses pelaksanaan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal, hal tersebut karena masih terdapat beberapa ketidaksesuaian data di lapangan. Sasaran utama kebijakan program adalah wilayah dan masyarakat desa secara luas, sehingga menyebabkan program menyebar pada komunitas warga secara sporadis, dan

bukan inti sasaran. Luasnya cakupan program (desa sebagai unit implementasi) menyebabkan program kurang dapat mengenali karakteristik kelompok yang urgen dan menjadi kelompok sasaran utama program. Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena nantinya akan berkaitan dengan penggunaan dan pembagian anggaran desa.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa proses reliabilitas dan penyusunan agenda prioritas kebijakan SDGs Desa di Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal, hal tersebut karena masih terdapat banyak kekurangan dalam melakukan pendataan dan penyusunan rencana.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan Sustainable Development Goals Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dimensi tepat kebijakan Sustainable Development Goals Desa belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya keberhasilan implementasi SDGs Desa dalam menekan angka kemiskinan. Hambatan yang dihadapi dalam tepat kebijakan ini yaitu program belum menjadi solusi utama bagi penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh kelompok/orang miskin, sebab kemiskinan tidak sama antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, setiap kelompok/orang miskin yang tinggal di desa memiliki kekhususan penyebab kemiskinan

yang mereka hadapi. Dan kemiskinan juga merupakan fenomena sosial-ekonomi dan politik serta kultural, yang tidak semata-mata sebagai fenomena kewilayahan.

2. Dimensi tepat pelaksana Sustainable Development Goals Desa belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana program SDGs dan sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs Desa belum sepenuhnya dapat memaknai dan memahami dimensi kebijakan SDGs. Karena sebuah kebijakan yang diimplementasikan dalam wujud program diawali dari bagaimana memaknai dan memahami dimensi dari kebijakan itu sendiri.
3. Dimensi tepat target Sustainable Development Goals Desa belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya jangkauan perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa ini.
4. Dimensi tepat lingkungan Sustainable Development Goals Desa sudah berjalan cukup optimal, hal tersebut dilihat dari pengukuran indikator terkait kepentingan aktor yang terlibat dan kinerja DPMD dalam melaksanakan program SDGs Desa.
5. Dimensi tepat proses Sustainable Development Goals Desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilihat dari reliabilitas dalam melakukan pelaksanaan kebijakan SDGs yang masih terdapat kekeliruan dalam proses pemutalhiran data SDGs Desa.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdal. 2015 Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Abidin, S.Z. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L.2020. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S.2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam VaRiant Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iskandar, A.H.2020. SDGs Desa Percepatann Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D Riant. 2018. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Usman, H. (2013). Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, A. 2014. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya Suta Dimas, 2023. Efektivitas Kebijakan Jakarta Laporan (Jaklapor) Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Dki Jakarta.
- Fahmi, I. 2019. *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian LEMHANNAS RI.
- Hartono Hasim, 2023. Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program “*Sustainable Development Goals* (SDGs)” pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. 6(2).
- Lina, A. dan Rastri, K. 2023. Sosialisasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dalam Menentukan Arah Pembangunan Desa di Kabupaten Karawang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Louise-Marie. 2015. Analysis of Multidimensional Poverty: Theory and Case Studies.7(1).
- Lutfia Mayasoni. 2022. Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. SOSPOLI, 169-175.
- Masta, D. Jonson, R. dan Vera, A. 2022. Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGS) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Citra Sosial Humaniora. 2828-1896.
- Muthmainnah, L., et al. 2020. Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. Jurnal Filsafat, 30(1), 23-45.
- Patiung, M. 2017. Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal’s Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 17(1).
- Trifita, A. dan Amaliyah, R. 2020. Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Global & Policy. 8(2).
- Umy, K, Andi. dan Hariyanti, H. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Tonrong Kecamatan Baranti Kabupaten.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksana Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.